

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Dalam bab ini disajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui penyebaran angket, wawancara, dan observasi. Penyebaran angket yang penulis lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dalam bentuk pernyataan kepada 90 responden yaitu dari masyarakat desa topang yang diambil secara acak, dan responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Kemudian melakukan wawancara kepada 5 responden dari Aparat Pemerintahan Desa. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penyebaran angket, wawancara, observasi kepada masyarakat dalam penelitian ini bermaksud untuk mencari data mengenai Implementasi fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui implementasi fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ini, penulis melakukan penelitian Deskriptif Kualitatif Persentase yaitu menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpul dari responden penelitian dipersentasekan dalam bentuk tabel frekuensi dan kemudian data tersebut dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari penyajian data dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	65	68,42%
2.	Perempuan	30	31,58%
<b>JUMLAH</b>		<b>95</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 95 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 65 responden laki-laki atau 68,04%, sedangkan responden perempuan sebanyak 30 responden atau 31,96%. Jadi jumlah keseluruhan responden yang dijadikan sampel sebanyak 95 orang.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 65 orang atau 68,04%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga.

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.2**  
**Tingkat Umur Responden**

No	Tingkat Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	20 - 29 Tahun	18	18,95%
2.	30 - 39 Tahun	40	42,11%
3.	40 - 49 Tahun	27	28,42%
4.	50 - 59 Tahun	10	10,52%
<b>JUMLAH</b>		<b>95</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 30-39 tahun yaitu sebanyak 40 responden atau 18,95%. Tingkat umur 20-29 sebanyak 18 responden atau 18,95%, kemudian tingkat umur 40-49 sebanyak 27 responden atau 28,42%, dan tingkat umur 50-59 tahun keatas berjumlah 10 responden atau 10,52%.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

Selanjutnya Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.3**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	10	10,52%
2	SD	25	26,32%
3	SMP / Sederajat	31	32,63%
4	SLTA / Sederajat	18	18,95%
5	Perguruan Tinggi	11	11,58%
<b>JUMLAH</b>		<b>95</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 95 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tidak

tamat SD sebanyak 10 orang responden atau 10,52%, tamat SD sebanyak 25 responden atau 26,32%, tamatan SMP sebanyak 31 responden atau 32,63%, tamatan SLTA 18 responden atau 18,95%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 11 responden atau 11,58%.

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. berdasar penjelasan dari tabel II.3, dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD, meskipun ada juga sebagian kecil responden yang tidak tamat SD yaitu responden yang termasuk dalam kategori umur 50 tahun keatas, dan menurut pengamatan penulis responden ini sudah bias tulis baca. dengan demikian, variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA dan ada juga yang Perguruan Tinggi.

Berikut ini adalah data responden dilihat dari mata pencaharian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.4**  
**Jenis Mata Pencaharian Responden**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	53	55,79%
2	Buruh Tani	15	15,79%
3	PNS	10	10,52%
4	Pedagang	5	5,26%
5	Nelayan	3	3,58%
6	Pengrajin Industri Rumah Tanga	4	4,21%
7	Tidak Bekerja	5	5,26%
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah sebagai petani yaitu 53 atau 55,79 % responden, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian bahwa bertani adalah jenis mata pencaharian utama masyarakat di Desa Topang, jenis pertaniannya yaitu kelapa dan karet. Kemudian untuk 15 orang responden yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani. Selanjutnya untuk 10 orang responden yang mempunyai mata pencaharian sebagai PNS adalah para guru Sekolah yang berada di Desa Topang, kemudian 5 orang responden berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian adalah pemilik warung atau kedai yang terletak di Desa Topang, selanjutnya untuk 3 orang reponden yang berprofesi sebagai nelayan, kemudian untuk 4 orang responden dari pengrajin industri rumah tangga, dan 5 orang responden yang tidak bekerja, berdasarkan pengamatan penulis adalah dari responden yang berjenis kelamin perempuan.

Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa di Desa Topang sudah ada peraturan desa dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel II.5**  
**Angket pernyataan 1**  
**Tanggapan Responden mengenai keberadaan peraturan desa**  
**(PERDES) di Desa topang**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat mengetahui	3	3,33 %
2	Mengetahui	7	7,78%
3	Ragu-ragu	29	32,22 %
4	Tidak mengetahui	50	55,56 %
5	Sangat Tidak mengetahui	1	1,11 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut yaitu mengacu pada pernyataan 50 atau 55,56 % responden yang menjawab dengan opsi “tidak mengetahui”. Hasil ini didukung oleh pendapat Bapak Abu Hasan Asy’ari yang selaku Kaur Pemerintahan di Desa Topang dalam wawancara dengan penulis pada Tanggal 10 Maret 2014, beliau mengatakan:

“Pemerintah Desa dan BPD sudah membuat dan mengesahkan Peraturan Desa, namun tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham dan tidak mengetahui tentang keberadaan Perdes tersebut”.

Berdasarkan pengamatan penulis selama dilokasi penelitian yaitu sejak 27 Febuari sampai 21 April 2014, pemerintah Desa Topang tidak melakukan sosialisasi terhadap PerDes yang telah dibentuk bersama BPD, sehingga masyarakat tidak pernah tahu seperti apa dan bagaimana fungsi peraturan desa tersebut.

Kemudian tanggapan responden tentang pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam menjalankan Peraturan Desa dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel II.6**  
**Angket pernyataan 2**  
**Pemerintah desa menjalankan peraturan desa (PERDES)**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	1	1,11%
2	Setuju	6	6,67 %
3	Ragu-ragu	29	32,22%
4	Tidak setuju	52	57,78 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa dalam menjalankan Peraturan Desa berjalan kurang baik. Yaitu mengacu pada pernyataan 52 atau 57,78% responden yang menyatakan “tidak setuju”.

Menurut pengamatan penulis selama berada dilokasi penelitian Pemerintah Desa Topang sudah menjalankan peraturan desa, namun karena peraturan tersebut tidak ada disosialisaikan sehingga masyarakat tidak tahu. Kemudian masyarakat juga merasa pemerintah desa belum melakukan sebuah tindakan yang tegas terhadap permasalahan social seperti minuman keras, pencurian hasil penen, perjudian yang sangat meresahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Seretaris Desa Topang yaitu Ibu Rubaidah, Spd. pada tanggal 10 Maret 2014 yang mengatakan:

“Sebenarnya sudah ada PERDES yang disahkan langsung oleh pemerintah desa berasama BPD, tapi Perdes Tersebut Sifatnya berlaku untuk dalam pemerintahan Desa Saja. Seperti peraturan tentang pendapatan asli desa, peraturan tentang perangkat desa, peraturan tentang pembentukan badan Usaha Milik Desa, karena itu diperlukan untuk pencairan anggaran dana desa (ADD). tapi kalau peraturan yang berkaitan langsung dengan social masyarakat seperti kasus pemukulan, minuman keras, pencurian atau yang lainnya itu belum ada. Dulu pernah diusulkan tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya”

**Tabel II.7**  
**Angket pernyataan 3**  
**Pernyataan responden mengenai keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) yang dibentuk oleh pemerintah desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat mengetahui	6	6,67 %
2	Mengetahui	72	80 %
3	Ragu-ragu	9	10 %
4	Tidak mengetahui	2	2,22%
5	Sangat tidak mengetahui	1	1,11 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang adanya lembaga kemasyarakatan desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Yaitu mengacu pada Pernyataan 72 atau 80% responden menyatakan “mengetahui”.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel II.8**  
**Angket pernyataan 4**  
**Pemerintah desa menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa**  
**(LKMD)**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	1	1,11 %
2	Setuju	12	13,33%
3	Ragu-ragu	21	23,33%
4	Tidak setuju	54	60,01 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel uraian diatas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Topang termasuk kedalam kategori kurang baik, yaitu mengacu pada pernyataan 54 responden atau 60,01% yang menyatakan dengan opsi “tidak setuju”. Hasil ini sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan di Desa Topang, pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa berjalan kurang baik, hal ini didukung oleh pendapat bapak Samsudin selaku Kaur Pembangunan dan Bapak hamzah salah satu Kepala Dusun desa topang dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 11 Maret 2014 mereka mengatakan:

“Sebenarnya lembaga kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan seperti pembangunan yang sifatnya partisipatif. Tapi di desa topang ini agak susah, karena lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa topang seperti LPMD misalnya, itu sekarang seperti tidak ada fungsinya dan bisa dikatakan hilang begitu saja”.

Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui adanya badan usaha milik desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Topang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel II.9**  
**Angket pernyataan 5**  
**Pernyataan responden mengenai keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) yang dibentuk oleh pemerintah desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat mengetahui	18	20,01 %
2	Mengetahui	67	74,44 %
3	Ragu-ragu	2	2,22 %
4	Tidak mengetahui	2	2,22 %
5	Sangat tidak mengetahui	1	1,11 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang keberadaan badan usaha milik desa di Desa Topang. Yaitu mengacu pada Pernyataan 67 atau 74,44% responden yang menjawab dengan opsi “mengetahui”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel II.10**  
**Anket Pernyataan 6**  
**Pemerintah Desa Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	3	3,33 %
2	Setuju	77	85,56 %
3	Ragu-ragu	7	7,78 %
4	Tidak setuju	2	2,22 %
5	Sangat tidak setuju	1	1,11 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan badan usaha milik desa berjalan cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 77 atau 85,56% responden.

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada dilokasi penelitian, didesa topang sudah terdapat Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang bergerak dibidang Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang sebelumnya masyarakat desa topang ini hanya menggunakan mesin diesel pribadi jika membutuhkan listrik, dan itu pun yang mampu hanya orang yang ekonominya menengah keatas. Namun setelah PLTD tersebut ada, hampir seluruh masyarakat desa dapat menggunakan listrik dalam berbagai keperluan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala desa topang yaitu bapak Syamsuharto pada tanggal 11 maret 2014 dan hasil yang sama ketika penulis melakukan wawancara dengan aparat pemerintah desa lainnya yang mengatakan:

“Penggerakkan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berjalan baik, BUMDES yang ada didesa topang ini bergerak dibidang PLTD, dimana ini juga sebenarnya dulu berawal dari aspirasi masyarakat Desa Topang yang sangat kuat menginginkan adanya listrik di Desa ini”.

untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah Desa Topang dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel II.11**  
**Angket Pernyataan 7**  
**Pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat**  
**dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	4	4,44 %
2	Setuju	72	80,01 %
3	Ragu-ragu	2	2,22 %
4	Tidak setuju	10	11,11 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa berjalan cukup baik yaitu mengacu pada pernyataan 72 atau 80,01 % responden. Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsudin selaku kaur pembangunan, dan Bapak syamsuharto selaku kepala di Desa Topang pada tanggal 11 Maret 2014 yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan dibidang sarana dan prasarana didesa topang sudah memadai, seperti sarana air bersih, jalan yang pembangunanya sudah hampir 80%, tanggul, ada pasar desa juga, dan Puskesmas juga sudah ada. Kalau Sekarang pemerintah desa topang sedang fokus pada pembangunan persawahan, supaya masyarakat desa topang tidak lagi berladang keluar. Kalau kendalanya dimana-mana ya itu soal pendanaannya saja”

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam upaya membina perekonomian desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.12**  
**Angket Pernyataan 8**  
**Pemerintah Desa Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Dalam**  
**Pembinaan Perekonomian Desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	-	%
2	Setuju	22	24,44 %
3	Ragu-ragu	15	16,67 %
4	Tidak setuju	51	56,67 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya membina perekonomian desa tidak berjalan baik, dengan mengacu pada pernyataan 51 atau 56,67% responden yang menyatakan “tidak setuju”, jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa topang Sudah melakukan upaya pembinaan perokonomian Desa, namun belum berjalan dengan baik. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Kepala Desa Topang yaitu Bapak Syamsuharto pada tanggal 11 Maret 2014, beliau mengatakan:

“Dalam melakukan pembinaan ekonomi Desa Topang kami bekerja sama dengan UED-SP, misalnya sekarang upaya kami dalam pembangunan tambak Udang dan itu berjalan lancar. Kami juga bekerjasama dengan PNPM dalam pemberdayaan perempuan dengan memberi modal usaha, sejauh ini program ini berjalan lancar”

Hasil yang beda penulis dapatkan ketika mewawancarai Bapak Abu Hasan Asy’ari yaitu selaku kaur pemerintahan di Desa Topang pada tanggal 10 Maret 2014 dan beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Topang ini kalau pemberdayaan dibidang ekonomi itu memang sudah ada, tapi tidak begitu jalan. Seperti pembuatan Tambak Udang yang sudah dikerjakan, memang ada kerjasama dengan UED-SP tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya lagi dari Bapak Kepala Desa. jadi terbengkalai begitu aja Tambak Udangnya tak ada isi.”

Menurut hemat penulis dalam melakukan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian pada tanggal 18 Maret 2014 bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam membina perekonomian desa tidak sesuai dengan target perencanaan, contohnya dalam pengembangan usaha ekonomi desa dibidang tambak Udang, yang mana perencanaanya adalah diseluruh dusun yang ada di Desa Topang, yaitu 5 (lima) dusun, namun kenyataanya yang terealisasi hanya di 2 (dua) dusun. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah desa dalam membina perekonomian desa belum berjalan dengan baik. Kemudian dalam pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi yang bekerjasama dengan PNPM melalui pemberian modal usaha tidak berjalan dengan baik, karena menurut pengamatan penulis modal usaha yang diberikan tidak tepat sasaran karena modal tersebut kebanyakan justru digunakan untuk konsumtif atau untuk keperluan rumah tangga lainnya. Pengamatan ini didukung dari hasil wawancara penulis pada 11 Maret 2014 dengan bapak Hamzah yang juga mengatakan bahwa;

“Dibidang ekonomi setahu saya pemerintah desa bekerjasama dengan PNPM. Caranya masyarakat dibentuk berkelompok dan mendapatkan modal usaha, Tapi saya lihat tak berkembang, karena uangnya bukan untuk buka usaha, kebanyakan malah digunakan

untuk keperluan sehari-hari. Soalnya istri saya juga minjam di PNPM. Seharusnya diadakan pembinaan itu”

Selanjutnya untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.13**

**Angket Pernyataan 9**  
**Pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat melalui**  
**pembinaan kehidupan social budaya**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	1	1,11 %
2	Setuju	51	56,67 %
3	Ragu-ragu	17	18,89 %
4	Tidak setuju	21	23,33 %
5	Sangat tidak setuju	0	0 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan keterangan tabel II.13 diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa Topang dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada pernyataan 51 atau 56,67% responden yang menyatakan dengan opsi “setuju”.

Kemudian berdasarkan pengamatan penulis dilokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa peduli dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Topang, hal ini terlihat dalam setiap adanya kegiatan acara yang dilaksanakan oleh desa seperti acara hari kemerdekaan dan acara kunjungan pejabat pemerintah daerah selalu ada pergelaran budaya dari masyarakat, seperti pencak silat dan Tarian Zapin perpaduan dengan musik

gambus yang merupakan budaya masyarakat Desa Topang. pengamatan ini diperkuat oleh pendapat salah satu tokoh adat dan budaya masyarakat Desa Topang yang juga sebagai Kepala Dusun, yaitu Dusun Pinang Masak Bapak Hamzah, dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 11 Maret 2014 beliau mengatakan:

“Budaya masyarakat di Desa Topang ini masih tetap terjaga dan berkembang, seperti tari zapin dan gambus, pencak silat, acara keagamaan seperti sima'an al-quran, Khal, Istighosah atau yang lain, dalam hal ini pemerintah desa selalu melakukan pembinaan dan memfasilitasi acara keagamaan dan pergelaran budaya tersebut, contohnya pada acara pertemuan budaya se-kecamatan, acara tujuh belasan, dan acara pesta masyarakat.”

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.14**  
**Angket Pernyataan 10**  
**Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	0	0 %
2	Setuju	46	51,11 %
3	Ragu-ragu	18	20 %
4	Tidak setuju	24	26,67 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa upaya Pemerintah Desa Topang dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan cukup baik, yaitu



mengacu pada pernyataan 46 atau 51,11% responden yang menyatakan dengan opsi ”setuju”.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, diketahui bahwa bentuk fasilitas tersebut adalah dengan memberikan undangan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam menghadiri rapat dan kemudian memberikan ide-ide atau masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa, pengamatan tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Seretaris Desa yaitu Ibu Rubaidah Spd, pada tanggal 10 Maret 2014 beliau mengatakan:

“Untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan yang sering kita sebut MusRenBang. Dalam Musyawarah inilah biasanya masyarakat menyampaikan Ide-ide mereka dalam perencanaan pembangunan untuk satu tahun kedepan”

Kemudian Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.15**  
**Angket Pernyataan 11**  
**Pemerintah Desa Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan**  
**Pembangunan**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	0	0%
2	Setuju	47	52,22 %
3	Ragu-ragu	12	13,33 %
4	Tidak setuju	27	30,01 %
5	Sangat tidak setuju	4	4,44 %
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Topang dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik. Yaitu berdasarkan Pernyataan 47 atau 52,22 % responden yang menyatakan dengan opsi “setuju”. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Maret 2014 dengan salah satu aparatur pemerintah desa, yaitu bapak Samsudin yang menjabat sebagai Kaur Pembangunan, beliau mengatakan:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Topang sepenuhnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa, partisipasi itu bisa dalam bentuk pikiran, tenaga maupun uang. Menurut saya, jika partisipasi pikiran dan uang tidak mau, alangkah baiknya menyumbangkan dalam bentuk tenaga, toh pemerintah desa selalu memberikan undangan gotong royong setiap ada kegiatan pembangunan sarana umum desa.”

Kemudian sejauh sepengetahuan penulis dilokasi penelitian Pemerintah Desa Topang selalu mengutamakan masyarakat Desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Topang. Artinya masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Desa untuk dipekerjakan, seperti dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan Desa. pengamatan ini didukung oleh wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Topang yaitu Bapak Syamsuharto pada tanggal 11 maret 2014 dan Bapak Abu Hasan Asy'ari selaku Kaur pemerintahan dalam wawancaranya pada tanggal 10 Maret 2014 yang mengatakan sebagai berikut

“Dalam pelaksanaan pembangunan kami selalu melibatkan masyarakat, Kenapa begitu?, karena jika pembangunan tersebut dikerjakan oleh masyarakat kita sendiri hasil nya pasti akan lebih bagus daripada orang luar yang mengerjakan. Misalnya dalam pengerjaan proyek jalan. Dan masyarakat pun mendapatkan pekerjaan”.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya Pemerintah Desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.16**  
**Angket Pernyataan 12**  
**Pemerintah Desa melibatkan Masyarakat Dalam Pelestarian**  
**Pembangunan Desa**

No	Alternative Jawaban	F	P
1	Sangat setuju	1	1,11 %
2	Setuju	50	55,56 %
3	Ragu-ragu	12	13,33 %
4	Tidak setuju	25	27,78 %
5	Sangat tidak setuju	2	2,22%
Jumlah		90	100 %

*Sumber: Data Olahan Lapangan, 2014*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan di Desa Topang terlaksana cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 50 atau 55,56% responden yang menyatakan dengan opsi “setuju”. Dalam wawancara penulis kepada salah satu aparat pemerintah desa Topang yaitu Bapak Hamzah selaku Kepala Dusun pada tanggal 11 maret 2014 beliau mengatakan:

“Kami selaku aparat desa selalu mengajak masyarakat desa untuk bersama sama menjaga kelestarian fasilitas umum desa,

seperti Jembatan, Pasar Desa, sarana air bersih atau yang lain. Alhamdulillah partisipasi masyarakat desa topang dalam menjaga kelestarian fasilitas desa cukup bagus. Karena mereka tahu jika itu rusak mereka juga yang susah jadinya”.

Sejauh pengamatan penulis dilokasi penelitian, setiap diadakan gotongroyong pemerintah desa selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu dan bersama-sama menjaga kelestarian fasilitas umum desa, seperti sarana air bersih. Partisipasi masyarakat Desa cukup baik. Desa topang merupakan sebuah Desa kecil yang dikelilingi oleh laut air asin, Sehingga kebanyakan air sumur yang dibuat oleh masyarakat juga terasa asin. Maka dari itu masyarakat sangat menjaga kelestarian Fasilitas air bersih tersebut.